

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan TINJAUAN DI Kota Palembang

Radelia Vebrianti¹, Katriza Imania², Aji Pangestu³, Shalima Zamaiya⁴, Piana Pebrina⁵

¹²³⁴⁵Universitas Sriwijaya

1radeliav28@gmail.com, 2katrizaimania@fisip.unsri.ac.id, 3Ajipangestu@fisip.unsri.ac.id,
4szamaiya08@gmail.com, 5pianapebrina380@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the management of regional finances in Kota Palembang as a means to support sustainable development. Utilizing a quantitative descriptive approach, the research analyzes the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) from the years 2019 to 2022. The findings indicate a budget realization rate of 92%, yet the city faces significant challenges stemming from a heavy reliance on central government transfers, which constitute approximately 60% of total regional income. This dependency restricts the fiscal flexibility of the local government, making it harder to respond effectively to local development needs and priorities. Additionally, the average financial independence ratio stands at only 60.5%, highlighting the low contribution from Original Regional Revenue (PAD). To address these issues, strategic efforts are required to strengthen fiscal autonomy, improve accountability, and enhance public participation in budgeting processes. Recommendations include optimizing PAD, fostering community involvement, and reinforcing internal control systems to ensure accurate financial reporting for better governance and sustainable outcomes.

Keywords: *Regional Finance Management, Sustainable Development, Financial Independence, Accountability, Palembang City.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, analisis dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2019 hingga 2022. Hasil menunjukkan bahwa realisasi anggaran mencapai 92%, namun tantangan signifikan muncul dari ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat, yang mencapai sekitar 60% dari total pendapatan daerah. Ketergantungan ini menghambat fleksibilitas fiskal pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dan prioritas lokal. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 60,5%, yang mencerminkan kontribusi rendah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses penganggaran. Rekomendasi mencakup optimalisasi PAD, peningkatan keterlibatan masyarakat,

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1396
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dan penguatan sistem pengendalian internal untuk menjamin ketepatan pelaporan keuangan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Berkelanjutan, Kemandirian Keuangan, Akuntabilitas, Kota Palembang.

A. PENDAHULUAN

Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa tahun belakangan, pengelolaan keuangan daerah (PKD) menjadi prioritas utama, karena fungsinya yang krusial dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga. Berdasarkan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2019 hingga 2022, tingkat realisasi anggaran mencapai 92%. Ada tantangan besar di balik angka tersebut, yaitu ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan daerah. Ketergantungan ini tidak hanya mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur keuangan secara fleksibel, tetapi juga menghalangi upaya untuk menanggapi kebutuhan lokal yang terus berubah dan mendesak.

Efektivitas penggunaan anggaran daerah perlu dievaluasi dengan lebih mendalam. Meskipun terdapat komitmen untuk mengalokasikan dana untuk program-program pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan proyek tersebut sering kali dihadapkan pada kendala, seperti kurangnya pendekatan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Weny Putri dkk. (2023) dan Kemas Welly Angga Permana (2021), menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal. Dengan memahami kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah Kota Palembang serta memberikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menelaah kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Palembang dalam kurun waktu 2019 hingga 2022. Metode ini dipilih karena memungkinkan penggambaran kondisi keuangan daerah secara lengkap, serta penilaian efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui analisis data berbentuk angka. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan informasi menyeluruh tentang pengelolaan keuangan daerah dan membantu penyusunan kebijakan yang lebih baik. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari laporan keuangan daerah, dokumen kebijakan resmi, serta sumber data dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Penelitian ini juga mencakup analisis rasio keuangan, seperti Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan dan belanja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang

Kota Palembang, yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan, memegang peran penting dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah (PKD) berperan sebagai alat utama untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk yang menekankan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan analisis laporan keuangan daerah tahun 2024, tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang mencapai 92%, dengan penekanan alokasi dana pada bidang infrastruktur, pendidikan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Meskipun secara keseluruhan kinerja keuangan daerah menunjukkan angka yang positif, kota Palembang dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan yang cukup besar terhadap dana yang ditransfer dari pemerintah pusat, yang mencapai sekitar 60% dari total pendapatan daerah. Ketergantungan ini secara substansial mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah, membuatnya sulit untuk merespon kebutuhan lokal secara cepat dan efektif. Efektivitas kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam lima tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indikator kemandirian keuangan daerah bahkan mencatat rata-rata hanya sekitar 60,5%, yang mencerminkan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Isu efektivitas penggunaan anggaran turut menjadi sorotan. Meskipun terdapat alokasi yang signifikan untuk program-program pembangunan berkelanjutan, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya, terutama terkait kurangnya pendekatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Ketidaksiuaian dalam penyajian laporan keuangan dan masalah dalam penerapan basis akrual menunjukkan perlunya perbaikan yang mendalam dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan hanya 85,71% dari laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, kinerja keuangan daerah masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Namun, untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, diperlukan langkah-langkah inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta integrasi antar sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan. Strategi pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan dapat membawa Kota Palembang menuju kemandirian keuangan yang lebih baik. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah harus menggali potensi sumber-sumber pembiayaan alternatif dan memperbaiki kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu menghadapi realitas yang terus berkembang.

Peran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Palembang. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tangguh, pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang merata. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya perlu dialokasikan untuk pembangunan fisik saja, tetapi juga untuk program-program yang langsung memperkuat ketahanan lingkungan dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Analisis anggaran menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menginisiasi beberapa program berbasis keberlanjutan, seperti pembangunan taman kota, pengelolaan limbah terpadu, dan pelatihan ekonomi kreatif untuk masyarakat lokal. Inisiatif ini sejalan

dengan kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya mendukung ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan menjaga lingkungan. Namun, porsi anggaran yang dialokasikan untuk aspek lingkungan dan sosial masih relatif kecil, sekitar 15% dari total belanja daerah. Hal ini menjadi perhatian karena pembangunan berkelanjutan memerlukan investasi yang berkelanjutan pula, yang berarti alokasi anggaran harus lebih proporsional untuk ketiga pilar pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi kinerja pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang masih lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata hanya 60.5%, yang dikategorikan sedang dan masih sangat bergantung pada bantuan pusat. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana secara mandiri untuk program-program pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Selain itu, efektivitas PAD Palembang juga masih rendah, dengan rata-rata 69.5%, yang berarti pemerintah belum optimal dalam merealisasikan target PAD yang telah direncanakan. Meskipun tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah cukup baik, mencapai 96%, rendahnya efektivitas PAD dan kemandirian fiskal menjadi kendala utama dalam mendanai inisiatif pembangunan berkelanjutan secara komprehensif.

Pengelolaan keuangan harus lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang holistik. Ini berarti pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta mencari sumber pembiayaan baru yang inovatif, termasuk melalui kerja sama dengan pihak swasta atau pendanaan internasional untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang lebih strategis dan berorientasi keberlanjutan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial secara bersamaan di Kota Palembang.

Tantangan dan Strategi Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan pembangunan:

1. Risiko kesalahan dan kecurangan: Terdapat risiko kesalahan pencatatan dan potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan yang perlu diminimalisir.
2. Konteks Birokrasi dan Budaya Kerja Lokal: Penerapan akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh konteks birokrasi dan budaya kerja lokal di Palembang.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beragam: Perbedaan kualitas sumber daya manusia antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan perhatian lebih lanjut.
4. Faktor Eksternal yang Belum Teridentifikasi: Sekitar 31,2% faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan belum termasuk dalam model studi, menunjukkan adanya tantangan lain yang perlu diidentifikasi.
5. Kebutuhan akurasi dan kepercayaan laporan keuangan: Penting untuk memastikan akurasi laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah dapat difokuskan pada tiga pilar utama yang harus dikelola secara sinergis:

1. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan fondasi penting untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, Strategi ini meliputi:

- a) **Transparansi dan Ketaatan Aturan:** Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) **Pelaporan yang Akurat dan Tepat Waktu:** Penyusunan laporan keuangan yang akurat, jujur, dan tepat waktu, serta disampaikan secara terbuka kepada DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
- c) **Akuntabilitas Integritas dan Hukum:** Memastikan ketaatan pada aturan dan penggunaan anggaran secara jujur dan akurat.
- d) **Akuntabilitas Proses:** Menjamin keandalan sistem informasi akuntansi dalam mendukung prosedur penyelesaian tugas.
- e) **Akuntabilitas Program dan Kebijakan:** Menilai pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan pertanggungjawaban pemerintah kepada legislatif dan masyarakat atas kebijakan yang dilaksanakan.
- f) **Peningkatan Pengawasan Internal:** Meningkatkan pengawasan internal untuk meminimalkan potensi penyimpangan atau kesalahan.

2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM yang memadai sangat krusial dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas, Strategi ini mencakup:

- a) **Pengembangan Pengetahuan:** Keterampilan, dan Sikap Memastikan individu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi organisasi secara efektif.
- b) **Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:** Melakukan pelatihan dan pendidikan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang regulasi keuangan, akuntansi, dan teknis pelaporan.
- c) **Rekrutmen Berbasis Profesionalisme:** Memastikan pegawai yang direkrut memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
- d) **Kemampuan Beradaptasi:** Membangun kemampuan SDM untuk beradaptasi terhadap perubahan dan mendukung pelaksanaan strategi organisasi.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem pengendalian internal yang efektif berperan penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Strategi ini meliputi:

- a) **Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah):** Menerapkan SPIP untuk memberikan keyakinan atas keandalan laporan, tata kelola yang baik, pelaporan yang akurat, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- b) **Komponen SPIP:** Memastikan kelima komponen SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan) berjalan optimal.
- c) **Evaluasi Berkala dan Penyesuaian:** Melakukan evaluasi secara berkala dan menyesuaikan sistem pengendalian internal dengan perkembangan kebijakan dan teknologi untuk meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan.
- d) **Pengawasan Ketat:** Memperkuat pengawasan dan prosedur yang ketat untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan keuangan.

D. KESIMPULAN

Analisis pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palembang dalam periode 2019-2022 masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Walaupun tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 92%, ketergantungan yang besar pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar 60% dari total pendapatan membatasi kemampuan fiskal dan keleluasaan pemerintah untuk menangani kebutuhan lokal secara aktif. Rasio kemandirian keuangan daerah yang rata-rata hanya 60,5% menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga menunjukkan kebutuhan akan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Efektivitas penggunaan anggaran juga perlu ditingkatkan. Meskipun telah dilakukan alokasi untuk program-program pembangunan berkelanjutan, masih terdapat kelemahan dalam realisasinya yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan pendekatan lintas sektor. Jadi, diperlukan inovasi dalam pengelolaan keuangan, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan internal menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Palembang dapat mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

E. SARAN

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, pemerintah Kota Palembang perlu fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan yang potensial. Ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses pembayaran pajak. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting; laporan keuangan harus disusun dengan jelas dan disampaikan kepada publik agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran dikelola. Keterlibatan publik dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi strategi kunci untuk mencapai pengelolaan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah harus berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan bagi pegawai agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan. Mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat juga penting untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan dalam laporan keuangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Palembang dapat mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillia, S., Zulkifli, & Oktarida, A. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi SDM, Dan SPI Terhadap Kualitas LKPD Di Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 9(2), 246-258.
- Fitriati, R., & Putra, M. G. (2023). Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 309-326.

- Permana, K. W. A. (2022). Analisis Implementasi Basis Akrua! Pada Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 5(1), 1-16.
- Septiana Aulia, Sabrina Nur Anisa, Afreizka Indah, M.Arif Krui Dipa, Maya Panorama. 2024. Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)*. Vol.4, No.1
- Weny Putri, Khairunnisa, Nelly, Nadilah. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang Periode Tahun 2019-2022. *Jurnal Sustainability Riset Akuntansi*, 1(2), 126-138.
- Yesi Mutia Basri. 2021. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *BAKI: Berkala Akutansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 6, No. 1